

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

**Bersiap
Menerapkan
PSAK 71**

**Pandji P. Djajanegara:
Mengusung
Revolusi Industri 4.0**

**Mengakselerasi
Two Speed Banking**

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Di Tengah Tantangan Ekonomi dan Digitalisasi

Perang dagang dan ketidakpastian perekonomian global masih berlangsung hingga saat ini. Diprediksi hal itu masih akan menyelubungi perekonomian dunia pada 2019. Tentu dampaknya akan menjalar ke perekonomian domestik dan berimbas pada para pelaku usaha di dalam negeri, termasuk pelaku industri perbankan.

Tantangan yang akan dihadapi para pelaku usaha, termasuk perbankan, pada tahun yang akan datang diproyeksikan bakal lebih berat ketimbang tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2018.

Dalam pemaparan Bank Indonesia (BI) terkait dengan situasi pasar keuangan global pada 2019 setidaknya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi para pelaku usaha, termasuk perbankan, antara lain kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed). Sepertinya kenaikan ini akan diimbangi BI dengan menaikkan suku bunga acuan di dalam negeri. Artinya, ke depan tren suku bunga akan tinggi, yang tentunya akan berdampak pada bisnis bank.

Pelaku perbankan harus bersiap dengan jurus jitu. Baik itu dalam mencari sumber pendanaan yang notabene saat ini likuiditas sedang ketat maupun dalam hal memilih proyek yang akan digarap—bank tentunya harus lebih selektif.

Selain tantangan tersebut, sejak beberapa tahun terakhir ini, pelaku perbankan menghadapi perkembangan teknologi yang demikian pesat. Hal itu telah mendorong pemain-pemain baru, yakni perusahaan yang bergerak di *financial technology* (*fintech*), yang juga masuk dalam bisnis seperti yang dijalankan bank.

Tantangan tersebut membuat perbankan mau tak mau harus bertransformasi sesuai dengan *platform* revolusi industri 4.0. Karena itu, “Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018” yang digelar Perbanas kali ini mengusung tema “*The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation*”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan, kehadiran *fintech* dan pelaku usaha teknologi sejenisnya menjadi tantangan bagi industri perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Industri perbankan pun harus berkompetisi dengan industri teknologi dengan transformasi yang begitu cepat.

Untuk merespons tantangan tersebut, pelaku industri perbankan harus bisa mengakselerasi bisnisnya dalam meraih profit dengan memberikan kemudahan akses dan layanan yang cepat serta membangun organisasi bisnis yang lincah dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal yang juga tak boleh diabaikan yaitu tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan kepercayaan yang telah menjadi roh bagi industri perbankan dalam menjaga “bisnis kepercayaan”. Inilah yang menjadi pembeda antara industri perbankan dan pelaku usaha lainnya, termasuk *fintech*. Terkait hal itu, transformasi dan digitalisasi perbankan harus dirancang dengan matang. Mulai dari menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), hingga regulasi yang mumpuni dari pemangku kebijakan. ■



Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Mengakselerasi Two Speed Banking 3
 Perkembangan teknologi yang makin pesat telah mendorong bisnis konvensional bertransformasi. Transformasi industri perbankan harus tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan *compliance* yang berlaku.



Efisiensi Berbalut Prudential Banking 6

Respons Regulator terhadap Pesatnya Teknologi 7
 Pemangku kebijakan harus cepat beradaptasi dan merespons pesatnya kemajuan teknologi. Terlebih bagi industri perbankan yang mengutamakan mitigasi dan kehati-hatian.

Aktualita Risiko Likuiditas Meningkat di Tengah Gejolak Ekonomi 8
 Ketidakpastian dan gejala ekonomi global berdampak pada industri perbankan nasional. Salah satu hal yang mesti dimitigasi dengan baik ialah risiko likuiditas.

Penyerapan KUR Tembus 81% 10

Profil Pandji P. Djajanegara
 Sharia Banking Director PT Bank CIMB Niaga Tbk

Mengusung Revolusi Industri 4.0 11
 Transformasi menjadi hal yang niscaya. Bagaimana industri perbankan bertransformasi di tengah revolusi industri 4.0?



Regulasi "Obat Kuat" BI untuk Rupiah 14

Liputan Khusus Di Tengah Pengetatan Likuiditas dan Suku Bunga Tinggi 16
 Ketidakpastian ekonomi masih terus berlangsung. Untuk terus tumbuh, pelaku industri perbankan harus mengantisipasi pengetatan likuiditas dan tren suku bunga tinggi.



Butuh Penguatan Modal 18
 Industri perbankan nasional membutuhkan penguatan permodalan untuk menghadapi era suku bunga tinggi dan menjaga keberlangsungan bisnis. Salah satunya melalui investasi asing.

Sekilas Berita Perbanas Sulut Peduli Korban Gempa Sulteng 19



Panen Lele Perdana Perbanas Jabar 20
Setetes Darah, Sejuta Harapan 21
Hadapi Revolusi Industri dengan Persiapan Matang 22
Bersiap Menerapkan PSAK 71 23
Perbanas Sulsel Gelar Fun Walk, Fun Run, dan Fun Bike Gratis 24

Suplemen Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
 - PT Jotun Indonesia 5

Indonesia Banking Expo 2018

"The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation"

Jakarta, November 15th 2018

Supported by



Mengakselerasi Two Speed Banking

Perkembangan teknologi yang makin pesat telah mendorong bisnis konvensional bertransformasi. Transformasi industri perbankan harus tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan *compliance* yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi, seluruh industri jasa keuangan, termasuk perbankan, terus bertransformasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang tengah berlangsung saat ini. Transformasi teknologi ini tentunya bisa memberikan solusi, tapi juga bisa menimbulkan eksese negatif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi *keynote speaker* pada acara "Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018" memuji daya tahan industri perbankan Indonesia yang cukup tahan banting menghadapi berbagai gejolak. Walau begitu, ia tetap memiliki catatan penting tentang industri perbankan, terutama terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) yang dapat mengakibatkan disrupsi bisnis perbankan.

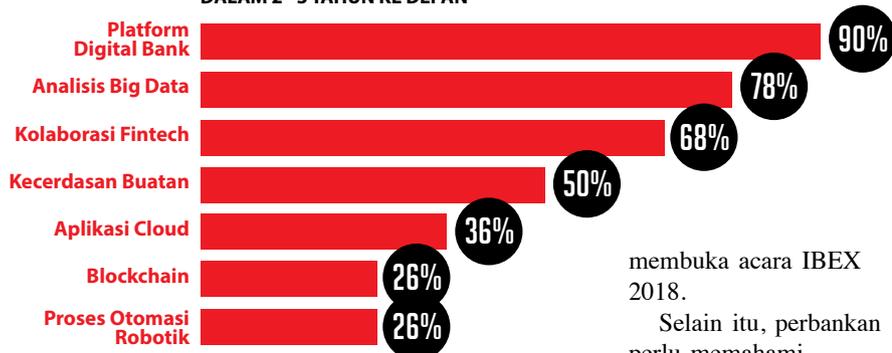
Untuk menekan dampak negatif akibat kemajuan teknologi tersebut, menurut Sri Mulyani, pelaku industri keuangan dan perbankan harus berakselerasi dan menciptakan inovasi-inovasi

baru. Namun, pelaku usaha juga harus tetap bisa menjaga kepercayaan yang diberikan nasabah.

Dalam kacamata Menkeu, industri keuangan pada dasarnya adalah mengelola kepercayaan. Meski bentuk uang kini sudah masuk ke ranah digital, tetap saja itu adalah amanah atau properti orang yang dititipkan. Sehingga, penting bagi industri keuangan untuk berinovasi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*). Artinya, kendati pelaku industri perbankan perlu melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, jangan sampai mereka berkompromi dan melonggarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau *good corporate governance (GCG)* dalam berbisnis.

"No matter that you are going to change your business model, integrating technology, dan bahkan sekarang berbaur dengan *fintech*. Fondasi dari bisnis Anda adalah *trust* dan *confidence*. Oleh karena itu, Anda semua mendesain transformasi ini jangan pernah melupakan *good corporate*

AREA YANG INGIN DIKEMBANGKAN BANK
DALAM 2-3 TAHUN KE DEPAN



Sumber: Survei Pricewaterhouse Coopers (PwC)

governance (GCG). Itu adalah sesuatu yang tidak dikompromikan, tidak dijadikan *excuses*, atau bahkan menjadi *reckless*,” tegas Menkeu di Fairmont Hotel Jakarta, Kamis, 15 November 2018.

Sri Mulyani juga mengingatkan pelaku industri perbankan untuk meningkatkan penerapan *GCG*.

Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, penerapan *GCG* di industri keuangan masih dalam kisaran “baik”. Sementara, Menkeu ingin skor *GCG* industri keuangan setidaknya “sangat baik”.

Pendapat Menkeu itu selaras dengan pandangan Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo. Di hadapan para bankir senior dalam acara bertajuk “*The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation*”, ia mengatakan bahwa kehadiran *fintech* dan beberapa mitra teknologi lain menjadi tantangan bagi industri perbankan konvensional dalam beberapa tahun terakhir. Perbankan pun harus berkompetisi dengan industri teknologi, dengan transformasi yang begitu cepat dan secara bersamaan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada regulasi dan pengelolaan risiko.

“Kalau kita lihat sekarang *two speed banking*. *Speed* pertama itu untuk melakukan pendalaman dan eksploitasi bisnis yang sekarang bisa kita lakukan. Bagaimana kita *make profit business to business*. *Speed* kedua, bagaimana kita membuat organisasi yang *agile* untuk menyikapi perubahan ke depan. Ini hampir semua bank melakukan,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri ini ketika

memaksimalkan peluang inovasi, model, dan proses baru dalam berbisnis, serta produk dan layanan yang lebih baik. Dengan makin intensifnya transformasi teknologi finansial di Indonesia, isu-isu terkait dengan kepercayaan, privasi, dan transparansi juga harus ditangani secara serius.

Perkuat Infrastruktur Digital

Untuk masuk ke ranah digital, industri perbankan harus mempersiapkan diri dengan matang. Menurut Sri Mulyani, seluruh sektor industri jasa keuangan khususnya harus memiliki tiga kunci penting untuk menghadapi revolusi tersebut.

Salah satunya, fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Selanjutnya, industri perbankan harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan mampu menghadapi tren perkembangan digital tersebut dengan terus melakukan edukasi dan pelatihan secara menyeluruh.

“Perbanas harus bisa memahami dan menyesuaikan cepatnya perubahan teknologi digital. Jangan sampai industri perbankan berhadapan dengan risiko kepunahan seperti dinosaurus,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya itu, regulator juga dinilai berperan penting dalam perkembangan digitalisasi perbankan untuk terus mendukung industri jasa keuangan agar lebih berkembang dan makin melayani masyarakat. Sri Mulyani menyebut, regulator harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. “Kita ingin lihat regulasi harus mampu *agile*. Sikap pemerintah

akomodatif dan *light touch*. Bagaimana industri *grooming*, tapi tetap jadi partner baik,” kata Sri Mulyani.

Dengan perubahan yang sedemikian cepat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan, inklusi keuangan menjadi penting, mengingat ekonomi digital cenderung mengesampingkan mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk masuk dunia digital. Perkembangan digitalisasi akan makin menjauhkan akses keuangan pihak-pihak yang belum terpapar penetrasi keuangan. Berdasarkan data World Bank, tambahannya, saat ini indeks penetrasi keuangan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain, meski terus meningkat.

Indeks penetrasi keuangan Indonesia tercatat 48%, meningkat dari posisi sebelumnya yang sebesar 36%.

Perkembangan ekonomi digital dipandang tak bisa dihindarkan dari perkembangan teknologi. Sehingga, dengan adanya perkembangan ini, industri perbankan diharapkan bisa menyerapnya agar tidak tertinggal.

“Masih ada sekitar 50% populasi penduduk Indonesia yang *excluded* (dari penetrasi keuangan). Kita masih tertinggal dari India. Padahal, kita memiliki *unicorn* yang diakui oleh global,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, tiga *unicorn* yang tidak hanya digunakan di kota besar, tapi juga di seluruh pelosok Indonesia, mampu menjadi penetrasi keuangan di sisi digital. Namun, hal itu masih perlu didukung ketersediaan infrastruktur sehingga bisa dipastikan bahwa ekonomi digital ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang saat ini masih “*excluded*” menjadi “*included*”.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur, agar masyarakat bisa mengakses digital. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun satelit yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan teknologi juga perlu didukung kualitas SDM yang mampu mengoperasikannya. Dari segi pendidikan, saat ini kualitas SDM di Indonesia dinilai masih terbatas. “Kalau di *fintech digital economy* kita bicara segmen populasi yang dikenal

dan kualitas SDM yang punya pendidikan dan bisa menggunakan itu masih terbatas,” ujar Sri Mulyani.

Persiapkan dengan Matang

Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Tak terkecuali, sektor perbankan, yang pada akhirnya menemui lebih banyak tantangan. Dengan hadirnya *fintech* dan mitra teknologi dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan bersiap menyongsong babak baru.

Menurut Kartika Wirjoatmodjo, pelaku industri perbankan memahami perubahan tersebut dan bekerja keras untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, berbeda dengan *fintech* yang dapat berinovasi dengan penuh leluasa, perbankan harus mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.

“Sektor perbankan memahami bahwa jawaban terhadap perubahan akibat revolusi teknologi ini harus holistik dan strategis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta hingga akademisi dan masyarakat secara luas. Perbankan tengah mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk berevolusi dalam lingkungan yang semakin kompetitif,” imbuh Ketua Steering Committee IBEX 2018, Tigor M. Siahaan.

Digitalisasi ekonomi membawa manfaat bagi konsumen serta membuka peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pintar, praktis, serta terhubung akan memungkinkan aktivitas ekonomi modern dilakukan dengan fleksibel, tangkas,

dan cerdas. Namun, ekonomi digital tetap menjadi tantangan karena sifat kompleksitasnya.

“Kita perlu memahami bagaimana teknologi maju tersebut dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan peluang inovasi, model, dan proses baru dalam berbisnis, serta produk dan layanan yang lebih baik,” kata Kartika.

Industri jasa keuangan, khususnya perbankan, harus mempersiapkan infrastruktur digital serta terus memperbarui teknologi dan aplikasi miliknya. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, dalam paparannya pada acara IBEX 2018 mengungkapkan, tren digital saat ini menuntut perbankan untuk siap merogoh kocek yang cukup dalam guna meningkatkan infrastrukturnya. “Tentang teknologi ini, tentu diperlukan dana dan *spend* luar biasa untuk mengembangkan teknologi. Kita BCA saja bisa sampai Rp5,2 triliun tahun depan,” ungkapnya.

Menurut pandangan Jahja, dana sebesar Rp5,2 triliun itu masih sangat wajar dikeluarkan perseroan demi pembaruan sistem aplikasi serta penambahan jaringan dan transformasi digital secara keseluruhan. Tak hanya itu, keamanan dan kenyamanan aplikasi dalam infrastruktur digital perbankan juga dinilai penting guna mengurangi risiko yang mungkin terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi.

Tak mau kalah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pun telah meningkatkan dana investasi *information technology (IT)* sekitar 10% pada tahun mendatang. Indra Utoyo, Direktur Teknologi Informasi BRI, pada kesempatan yang sama menyebutkan bahwa dana tersebut dipersiapkan guna meningkatkan infrastruktur digital. ■

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. JOTUN INDONESIA



Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPH tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2018 sebesar Rp. 8.783.902.734,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
PT. HANJUNG INDONESIA	01.824.308.9-055.000	JL. SOEKARNO HATTA KM 11.5 LK. 2 RT 001/01, SRENGSEM PANJANG, BANDAR LAMPUNG	5.000.000.000	4.727.289.733
PT. SUBUR DJAJA TEGUH	01.369.999.6-007.000	JL.RAYA BOGOR KM 19 NO.107 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR 13510	1.600.000.000	681.199.200
HENNY GOSAL / DEPO TEKNIK	75.336.809.1-951.000	JL.SAPTA TARUNA KM 10 RT.005 RW.004 MATALAMAGI SORONG UTAA KOTA SORONG PAPUA BARAT	500.000.000	466.021.315
PT. BAHARI CAHAYA MARITIM	03.262.914.9-048.000	KOMP PERKANTORAN SUNTER PERMAI BLOK E6 KAV 12-9 RT.00 RW.014 JL.DANAU SUNTER UTARA AGUNG KEL.SUNTER KEC.TANJUNG PRIOK JAKARTA	500.000.000	447.474.316
PT. ROCKY MITRA BANGUNAN SINAR BANGUNAN (YASMIN)	03.091.512.8-822.000	JL. PALMA HUANGOBOTU-DUNGINGI KOTA GORONTALO 96139	500.000.000	404.137.519
TOKO MITRA PAPUA	-	JL.RAYA SEMPLAK NO.24 PEREMPATAN SEMPLAK,YASMIN BOGOR	400.000.000	381.357.982
CV. FAN FINISHING	02.155.008.2-411.000	JL.BARU TEMBUS MELATI KEL.WAI MHOROCK DISTRK ABEPURA	300.000.000	293.842.634
PT. SHAKA PRIMA VIDIA	21.038.043.2-414.000	KOMP.MABAD 25 NO.V 315 RT.09 RW.05 REMPOA-CIPIUAT TANGERANG	250.000.000	248.008.999
CV. PUTRA RINDANG BENUA	03.320.783.8-517.000	JL.MERAK RAYA BLOK H-1 NO.132 CIKARANG BARU, MEKARUMUKTI CIKARANG UTARA, BEKASI	250.000.000	238.322.925
PT. TRIMITRA SINERGI SEJAHTERA	31.641.338.4-435.000	JL.TENGGER SELATAN NO.16 RT.007 RW.007 KEL.GAJAH MUNGKUR, KEC.GAJAH MUNGKUR, SEMARANG, JAWA TENGAH	250.000.000	224.270.867
CV. GAPURA JAYA TEKNIK	21.007.148.6-435.000	PERMATA METROPOLITAN 1 BLOK E NO.7 RT.009/RW. 004 KELURAHAN CIBUNTU KARANG BARU KECAMATAN CIBITUNG BEKASI JAWA BARAT	200.000.000	190.497.456
PT. JAVA PERKASA	02.665.460.8-015.000	PERUM GRAMAPURI TAMAN SARI V BLOK CC.7 RT.011/016/III WANASARI-CIBITUNG BEKASI	200.000.000	153.203.606
PT. JHS PRECAST CONCRETE INDONESIA	01.561.947.1-028.000	TEBET TIMUR DALAM RAYA NO.9 RT.008 RW.004 TEBET TIMUR TEBET,JAKARTA SELATAN 12820	100.000.000	90.597.740
UD. SATRIA PERDANA	-	JL.TANAH ABANG II NO.23 PETUJO SELATAN GAMBIR JAKARTA PUSAT	100.000.000	85.537.320
TOKO NEW LIBRA MOTOR UTAMA JAYA	14.953.582.5-941.000	JL.GAJAH MADA PENA, TOI KOTA BIMA, NTB	100.000.000	51.708.561
		JL.WAILOLA RT.002 RW.002 BULA-BULA, SERAMBAGIAN TIMUR	60.000.000	50.352.000
		JL.KHAIRIL ANWAR NO.14, SUKOWO JEMBER	100.000.000	50.080.560
JUMLAH				8.783.902.734

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPH Badan sebagai lampiran.

Efisiensi Berbalut Prudential Banking

Revolusi industri 4.0 memang menjanjikan kemudahan bagi nasabah dan efisiensi bagi perbankan. Namun, pelaku industri perbankan harus tetap memegang teguh prinsip *prudential banking*.

Seiring dengan makin banyaknya alternatif instrumen transaksi keuangan melalui teknologi digital, kompetisi di industri perbankan pun makin ketat. Transaksi perbankan saat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh bank. Institusi-institusi nonbank pun bisa melakukannya melalui *financial technology (fintech)*, yang keberadaannya kian menjamur.

Presiden Direktur (Presdir) PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengatakan, menjamurnya *fintech* seharusnya tidak menjadi ancaman bagi industri perbankan. Justru, pelaku industri perbankan harus berani bersaing dengan *fintech* yang tidak takut “membakar” uang demi promosi.

Jahja menekankan, pengembangan *fintech* di sektor perbankan seharusnya tidak hanya berlandaskan pada efisiensi semata. Sebab, yang perlu kembali ditegaskan adalah basis industri perbankan yang berlandaskan pada kepercayaan konsumen. Industri perbankan harus benar-benar memahami konsumen apa yang akan disasar serta target pasar yang akan dikembangkan pada masa mendatang.

BCA sangat serius merespons kebutuhan kaum milenial melalui transformasi teknologi. Pada 2019, BCA berencana mengeluarkan investasi sebesar Rp5,2 triliun khusus untuk pengembangan teknologi informasi (TI) dan digital. Dana tersebut dinilai masih sangat wajar guna terus memperbaiki sistem aplikasi, menambah jaringan dan transformasi digital secara keseluruhan. Ia menambahkan, dana untuk perawatan TI dan digital terus bertambah seiring dengan perkembangan yang ada. “Untuk transformasi itu ‘kan butuh *budget* cukup besar. Ada juga aspek lain, seperti aspek legal, komplain, risiko, juga yang terutama keamanan sistem,” kata Jahja ketika memberikan paparan pada “Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018”, di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Tidak mau ketinggalan, PT Bank Mandiri Tbk juga menyiapkan sekitar US\$200 juta atau sekitar Rp3 triliun untuk investasi TI untuk 2019. Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan, dana tersebut meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan anggaran 2018 sebesar US\$150 juta.

“Pertama, akan digunakan salah satunya untuk pengembangan server, jadi ada perluasan dari sisi kapasitas, *capability server*. Kedua, untuk aplikasi-aplikasi baru digital bank,” katanya.

Kartika menambahkan, server yang akan diperkuat berada di dalam negeri. Bank Mandiri juga sedang menjajaki



Sistem teknologi informasi; butuh dana besar

pembangunan *cloud*. Jika bisa membangun *private cloud* yang aman, maka sistem akan pindah ke sana.

Melihat geliat bank-bank besar lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga cukup agresif mengembangkan layanan digitalnya. Direktur TI dan Operasional BRI, Indra Utoyo, mengatakan, BRI pada tahun ini menganggarkan dari total pengeluaran untuk mengelaborasi perbankan digital. Untuk 2019, BRI meningkatkan anggaran untuk TI sebesar 10% atau sekitar Rp3,5 triliun.

BRI melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak sebagai sarana transformasi. Saat ini BRI telah bekerja sama dengan Investree. Indra mengatakan, perusahaannya akan membuka kesempatan-kesempatan baru, dengan bank sebagai platform atau *wholeseller lender* dan *fintech* yang menjalankan fungsi operasional.

Sementara itu, Dadang Setiadi, Direktur TI & Operasi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, mengungkapkan, BNI memfokuskan pada pengembangan digital dalam lima bidang. Pertama adalah *digital branding* dan *proposition*, menciptakan *image* baru BNI sebagai bank digital. Selanjutnya adalah membuka *digital channel*, *new banking experience*, melalui diferensiasi *channel* layanan perbankan. Ketiga, mengembangkan “digital business” baru dan ekosistemnya. Keempat, mengembangkan sistem TI yang gesit serta lincah untuk mendukung pengembangan *digital banking* yang dinamis. Terakhir, transformasi sumber daya manusia (SDM) yang berbasis digital, melalui strategi *empowering leaders*, pengembangan inovasi serta budaya digital perusahaan. ■

Respons Regulator terhadap Pesatnya Teknologi

Pemangku kebijakan harus cepat beradaptasi dan merespons pesatnya kemajuan teknologi. Terlebih bagi industri perbankan yang mengutamakan mitigasi dan kehati-hatian.

Digitalisasi mendorong dan menumbuhkan inovasi, *entrepreneurship*, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Penggunaan teknologi dalam bisnis jasa keuangan dipercaya dapat memperluas akses yang lebih besar, terutama pada inklusi keuangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan layanan menjadi lebih baik dan terjangkau oleh pelanggan (*customer*).

Kehadiran teknologi baru dalam industri keuangan memperluas kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memberikan layanan kepada nasabah atau pelanggan yang lebih terjangkau, lebih cepat, dan lebih baik. Erwin Haryono, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembiayaan Bank Indonesia (BI), mengatakan, pengertian ekonomi digital itu luas, tapi fokus pada inovasi teknologi yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial. Penggunaan teknologi sudah terjadi sejak revolusi industri 3.0 dan akan kian meluas penggunaannya pada industri 4.0 akibat teknologi baru yang memadukan fisik, digital, dan biologi.

Perkembangan teknologi berdampak cukup positif bagi perekonomian. Namun, menurut Erwin, pemanfaatan teknologi di sektor riil maupun finansial juga memiliki implikasi buruk. Karena itu, bank sentral harus berperan seimbang dalam memompa inovasi dan menjaga risiko. Di satu sisi, BI harus mampu mendorong inovasi untuk pertumbuhan sektor keuangan. Di lain sisi, idealnya risiko yang muncul karena inovasi ini tidak bertambah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Erwin dari berbagai survei, kondisi industri perbankan pada masa depan akan bergeser. Model bisnis perbankan akan berubah dari *product centric* ke *consumer centric*. Perubahan ini terjadi karena berbagai kemudahan yang dihadirkan teknologi baru, yang perkembangannya teramat cepat.

Sementara itu, Boedi Armanto, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengemukakan, teknologi baru ini merupakan alat yang



Boedi Armanto; efisiensi operasional

dikembangkan oleh manusia untuk manusia. Jadi, tidak mengherankan jika tingkat adopsinya cukup tinggi karena kemudahan yang dihadirkan.

Pengembangan perbankan digital dinilai penting oleh OJK mengingat persaingan perbankan dengan jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) makin melebar. Selain dapat memperkuat layanan, penerapan teknologi digital di dalam bisnis bank akan membuat lebih banyak peluang bagi kinerja bank, terutama efisiensi.

Dalam pandangan Boedi, dari sisi regulator, ada empat faktor yang harus segera ditanggapi. Keempat faktor

tersebut ialah perlindungan konsumen, manajemen risiko, kolaborasi dengan pihak lain, serta metode pengawasan. OJK sendiri terus berusaha untuk memfasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan baru seiring dengan terus berkembangnya teknologi jasa keuangan.

Boedi menyebutkan tidak sedikit peraturan yang telah dikeluarkan OJK. Baik dalam bidang perkembangan teknologi dalam perbankan, perlindungan konsumen, inovasi dalam teknologi, maupun bidang lainnya, seperti keamanan dan pencegahan penyalahgunaan sektor keuangan.

“OJK ingin mendorong efisiensi operasional bank melalui penggunaan teknologi, meningkatkan kualitas yang cepat, mudah dan lebih baik, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan *IT*,” ujarnya dalam salah satu sesi diskusi di “Indonesia Banking Expo (IBEX) 2018”.

Di lain pihak, BI telah melakukan berbagai langkah untuk mengakomodasi perkembangan teknologi jasa keuangan sejak 2016. Langkah yang dimaksud di antaranya membuka FinTech Office, Payment Transaction Regulation, Program Meet The Start Up, AML/CFT Regulation, Fintech & Regulatory Sandbox Regulation, National Payment Gateway, dan Electronic Money.

“Kecepatan *IT* dalam penetrasi *payment system* mengharuskan BI untuk memutuskan kebijakan dengan tepat dan sesuai untuk memastikan keberlanjutan inovasi dalam koridor yang *prudent*,” tegas Erwin. ■

Risiko Likuiditas Meningkatkan di Tengah Gejolak Ekonomi

Ketidakpastian dan gejolak ekonomi global berdampak pada industri perbankan nasional. Salah satu hal yang mesti dimitigasi dengan baik ialah risiko likuiditas.

Tantangan yang menghadang dunia perbankan dalam waktu dekat cukup menantang. Seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), sisi likuiditas bank-bank di Indonesia mendapatkan perhatian utama. Terkait dengan hal itu, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengadakan acara “CEO Forum Perbanas-LPS” pada 4 Oktober 2018, di Ruang Gerbera, Lt. Mezzanine, Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Acara yang dihadiri para *chief executive officer (CEO)* bank tersebut diawali dengan sambutan dari Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo dan Ketua Dewan Komisiner LPS, Halim Alamsyah. Sebelum acara utama dimulai, acara dilanjutkan dengan peluncuran logo baru LPS.

Dalam sambutannya, Kartika mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini adalah dampak dari kondisi eksternal. Ia juga mengatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan berdampak terhadap ekonomi secara signifikan. Hal itu terlihat dari geliat perusahaan yang mempunyai pendapatan dalam mata uang dolar AS.

“Kita melihat di Indonesia sebenarnya ada sisi positif dari penjualan komoditas *crude palm oil (CPO)*. Batu bara meningkat harganya. Sisi yang harus kita mitigasi adalah *open position*. Nah, kita di Perbanas berusaha untuk menjaga usaha kredit perbankan tidak terpengaruh dengan peningkatan kurs dolar ini, dengan cara memastikan nasabah kita yang memiliki kredit dengan valuta asing, harus memiliki *national head* atau *internal hedging*,” ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ini.

Kartika menambahkan, untuk meyakinkan para investor agar tidak menarik investasinya di Indonesia, Perbanas



Kantor cabang bank; mencari dana

berharap defisit fiskal pada akhir tahun 2018 akan menyempit, tidak melebar atau naik. Menurutnya, Indonesia termasuk negara yang defisit fiskalnya berada pada rentang 2,0%-2,5%. Walaupun ada peningkatan pada Juni lalu, pada akhir tahun 2018 angka tersebut diharapkan menurun.

Karena itu, diharapkan pada tahun 2018 pendapatan pemerintah meningkat, ditandai dengan neraca pemerintah yang defisit fiskalnya menurun di bawah 2%. Dari sisi perbankan, *non performing loan (NPL)*-nya menuju 2,7% dan pertumbuhan kreditnya meningkat ke level 13% sehingga momentum pertumbuhannya ada.

“Kita melihat dalam hal ini perbankan dalam kondisi baik. Perbankan diharapkan memiliki kekuatan untuk menahan kondisi ini sehingga tidak menurun kualitasnya pada 2019,” tegas Kartika.

LDR Makin Meningkat

Sementara itu, dua narasumber utama dalam forum tersebut, yakni Destry Damayanti, Anggota Dewan Komisiner LPS dan Iwan Jaya Azis, ekonom Cornell University, menyampaikan kondisi terkini likuiditas di Indonesia serta global. Pemaparan dari narasumber ini dipandu oleh moderator

CEO Forum, Ahmad Fajar, selaku Pengurus Bidang Humas Perbanas.

Menurut Destry, likuiditas perbankan mulai mengering. Dana nasabah yang dikumpulkan bank dari tabungan dan deposito makin menipis karena penyaluran kredit yang makin masif. Tak heran jika mulai ada bank yang cukup kelimpungan mencari cara untuk mendapatkan dana demi melayani permintaan kredit yang tinggi.

Ketatnya likuiditas bisa dilihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) yang sudah mencapai 94% per Agustus 2018. *LDR* di level tersebut dianggap sudah memasuki batas ketat menurut regulator, yakni di kisaran 93%-102%. “Ini harus diwaspadai karena batas amannya 92%,” kata Destry dengan tegas.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), rentang *prudent* atau kehati-hatian untuk *LDR* perbankan adalah minimal 78% dan maksimal 92%. Jika melebihi batas maksimum *LDR*, berarti bank sangat gencar menyalurkan kredit tapi tidak sebanding dengan dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), misalnya, *LDR*-nya mencapai 112,8% pada kuartal/triwulan ketiga 2018. Menurut Direktur Bank BTN, Mahelan Prabantari, saat ini perbankan tengah dihadapkan pada masalah likuiditas yang mengetat lantaran adanya kenaikan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* sebesar 150 *basis point* (*bps*) sepanjang 2018.

“Pertama, risiko likuiditas tidak bisa dihindari karena posisi kita sama dengan meningkatnya *BI 7-Day Reverse Repo Rate*. Jadi, secara nasional pasti mengetat. Karena suku bunga BI naik, maka perbankan harus menyesuaikan, khususnya untuk *funding*. Saya kira *LDR* sampai dengan akhir 2018 sekitar 112%-117%,” ujar Mahelan.

Destry khawatir jika masalah likuiditas terus berlanjut, hal itu bisa mengganggu tingkat solvabilitas. Terlebih lagi, pada 2019 pertumbuhan DPK dan kredit perbankan diperkirakan stagnan di kisaran 9% hingga 12%.

Ia menambahkan, selain DPK, perbankan sebenarnya bisa mengandalkan pendanaan dari obligasi atau instrumen utang, seperti sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit/NCD*) atau lainnya. Namun, saat ini kondisi pasar belum kondusif bagi perbankan untuk menerbitkan instrumen utang karena imbal hasil yang diminta investor relatif tinggi.

Meskipun begitu, Destry mengingatkan bahwa *LDR* bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur likuiditas perbankan. Masih ada indikator lain, seperti *loan to financing ratio (LFR)*. Ada juga pembiayaan kredit dengan penerbitan obligasi dan instrumen lainnya. “Tapi, dengan *bond yield* (bunga obligasi) yang tinggi, bank juga akan pikir-pikir untuk menerbitkannya,” tegasnya.



Destry Damayanti;
likuiditas mulai mengering

Studi Prediksi

Di tengah pengetatan *LDR* perbankan nasional, perilaku pasar saat ini sulit diprediksi sehingga dibutuhkan upaya untuk mendalami para pelaku pasar tersebut. Menurut Iwan Jaya Azis, dalam kaitannya dengan masalah tersebut, studi tentang bagaimana mengendalikan perilaku pasar yang berkembang menjadi penting. Penelitian ekonomi sekarang ini perlu untuk mempunyai kemampuan prediktif.

“Daya prediksinya tidak harus sempurna. Misalnya krisis, tidak ada yang mampu membuat prediksi mengenai terjadinya krisis, namun bisa memprediksi terjadinya *vulnerability* walaupun tidak selalu berakhir krisis,” ujar Azis.

Azis menyoroti para pembuat kebijakan yang dianggapnya sering kurang mendalami informasi yang ada. Pengambilan keputusan kerap berdasarkan informasi terakhir saja. Jangan sampai regulator terbuai dengan “fundamental baik” karena pengertiannya berubah.

Masih menurut Azis, meski pemerintah kita sempat “berpesta” dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, nyatanya neraca berjalan defisit, penggunaan sumber alam berlebihan, *unsustainable*, dan tidak efisien. Di lain sisi, daya saing juga cenderung menurun. Perilaku sektor keuangan bisa membalik keadaan secara mendadak di tengah keterkaitan antarnegara yang makin besar dan kompleks.

Karena itu, ekonom yang mengajar di AS tersebut menekankan pentingnya aktivitas penelitian untuk meningkatkan kualitas perdebatan mengenai kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan sebagai dasar dan referensi dalam menentukan kebijakan. “Mudah-mudahan pengambil kebijakan betul-

betul memanfaatkan hasil dari penelitian karena tidak ada artinya jika penelitian dilakukan tanpa ada implikasi,” pungkas Azis. ■

Likuiditas perbankan mulai mengering. Dana nasabah yang dikumpulkan bank dari tabungan dan deposito makin menipis karena penyaluran kredit yang makin masif. Tak heran jika mulai ada bank yang cukup kelimpungan mencari cara untuk mendapatkan dana demi melayani permintaan kredit yang tinggi.

Penyerapan KUR Tembus 81%

Terus meningkatnya subsidi pemerintah untuk KUR mendapatkan respons positif dari masyarakat. Penyerapan KUR sampai dengan kuartal ketiga 2018 telah mencapai 81% dengan menyisakan tiga bulan berjalan.

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada perekonomian nasional cukup besar. Jumlahnya mencapai 99,9% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97,22%. Dari data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, per Juli 2018, UMKM menyumbang terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 60,34%.

Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan PDB dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor UMKM ke rantai pasok produksi global sangat minim. Tercatat, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya sebesar 0,8%.

Karena itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan kerap mengatakan bahwa UMKM harus naik "kelas", tidak boleh hanya bertahan di usaha kecil. Sehingga, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan "kelas" UMKM adalah dengan memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, menyatakan, KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan pelaku UMKM mengakses kredit secara berkeadilan. Tujuannya untuk mendukung penguatan UMKM sehingga memiliki daya saing.

"Target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun sepanjang 2018. Hingga posisi September 2018 kredit yang sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3,79 juta orang," terang Puspayoga dalam siaran pers yang diterbitkan 26 Oktober 2018.

Dengan capaian angka tersebut berarti KUR sudah tersalurkan sebanyak 81% dari target pemerintah hingga kuartal ketiga 2018. Lebih detail lagi, dalam laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Republik Indonesia, kredit dengan bunga subsidi ini disalurkan oleh 34 lembaga keuangan berupa bank umum, bank pembangunan daerah (BPD), perusahaan pembiayaan, dan koperasi.



Pengusaha UMKM; harus naik "kelas"

Perlu diketahui, sejak Januari 2018, Kemenko Perekonomian menurunkan suku bunga KUR menjadi 7% dari sebelumnya 9%.

Jangan Nominal Saja

Pengamat perbankan, Krisna Wijaya, mengungkapkan, prognosis terhadap UMKM sering kali dikatakan bahwa kendala pengembangannya adalah karena keterbatasan modal. Dari prognosis tersebut, maka salah satu jalan keluarnya adalah perlunya peningkatan akses UKM untuk mendapatkan permodalan berupa kredit dari bank, seperti KUR. "Pemerintah akhirnya mendorong semua pihak terkait, khususnya perbankan, agar lebih progresif memberdayakan UKM melalui KUR," ungkapinya dalam rubrik "Column" di Majalah *Infobank* yang terbit pada 2016 lalu.

Untuk itu, masih kata Krisna, digunakan asumsi bahwa permintaan kredit akan meningkat apabila tingkat suku bunga rendah dan adanya skema berupa sistem prosedur yang lebih dimudahkan. Karena kemudahan selalu meningkatkan risiko, pemerintah menyediakan program penjaminan untuk KUR melalui Askrindo dan Jamkrindo.

Dari sisi suku bunga KUR, pemerintah terus melakukan upaya penurunan secara bertahap. Pada 2015, suku bunga KUR diturunkan menjadi 12%, lalu pada 2016 menjadi 9%, dan tahun ini menjadi 7%. Penurunan suku bunga ini tentunya menurunkan biaya dana yang ditanggung pelaku UMKM sebagai target dari penyaluran KUR. ■

Pandji P. Djajanegara,
Sharia Banking Director PT Bank CIMB Niaga Tbk

Mengusung Revolusi Industri 4.0

Transformasi menjadi hal yang niscaya.
Bagaimana industri perbankan bertransformasi
di tengah revolusi industri 4.0?

Perbanas kembali menggelar Indonesia Banking Expo (IBEX) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 15 November 2018. IBEX kali ini mengusung tema “*The Next Generation of Banking in The Fourth Industrial Transformation*”.

Tema IBEX 2018 tersebut mengandung urgensi bahwa revolusi teknologi yang terjadi saat ini telah mengubah cara hidup masyarakat, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Hal itu juga berdampak pada industri perbankan di Tanah Air. Terlebih dengan hadirnya pemain baru, seperti *financial technology (fintech)* dan sejenisnya.

Melalui IBEX 2018, diharapkan muncul sebuah kesepahaman mengenai peran masing-masing sektor, serta pemanfaatan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana industri perbankan seharusnya merespons transformasi revolusi 4.0? Berikut ini wawancara lengkap *Probank* dengan Pandji P. Djajanegara, Ketua *Organizing Committee* IBEX 2018 yang juga menjabat sebagai *Sharia Banking Director* PT Bank CIMB Niaga Tbk. Petikannya:

IBEX 2018 belum lama digelar. Apa perbedaan gelaran kali ini dibandingkan dengan sebelumnya?

Berbeda dengan IBEX sebelumnya, tahun ini kita mencoba untuk menyelenggarakan IBEX dalam sehari. Tujuan memadatkan acara dalam satu hari antara lain untuk lebih fokus dalam membicarakan satu tema. Di samping itu, kita percaya dengan konsep ini, maka tokoh-tokoh bankir yang hadir



lebih terkonsentrasi, fokus dalam satu acara, tempat, tanggal, dan jam tertentu.

Perbedaan lain dalam IBEX kali ini, kesimpulan dari materi dan diskusi yang terjadi dirangkum menjadi sebuah *paper* yang nantinya akan diserahkan kepada regulator dan pemerintah. *Paper* ini diharapkan dapat memberikan masukan berarti bagi regulator dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perbankan di tengah perkembangan teknologi yang cepat berubah. Gambaran besarnya saya rasa sudah disampaikan oleh Tigor M. Siahaan dan Kartika Wirjoatmodjo.

Tigor mengemukakan sektor perbankan memahami bahwa jawaban terhadap perubahan akibat revolusi teknologi ini harus holistik dan strategis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta hingga akademisi dan masyarakat secara luas. Perbankan tengah mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk berevolusi dalam lingkungan yang semakin kompetitif.

Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, transformasi digital, transformasi industri keempat, pasti akan membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Bank-bank anggota Perbanas memahami hal ini dan bekerja keras untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat, sementara pada saat yang sama kami juga harus mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi, serta mengelola risiko-risiko terkait.

Hanya saja, untuk mencapai hal tersebut kita perlu *support* dari regulator. Berangkat dari gagasan tersebut, maka disusun *paper* dari hasil diskusi IBEX 2018. Rencananya, *paper* ini akan kita serahkan kepada Gubernur BI (Bank Indonesia) dan Ketua Dewan Pembina OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Konkretnya seperti apa?

Perbanas menyadari bahwa industri perbankan tidak bisa berdiri sendiri. Melalui IBEX 2018, kita ingin tahu, nasabah-nasabah kita lima hingga sepuluh tahun ke depan seperti apa melakukan transaksi usahanya. Apa fokus mereka dalam membangun industrinya, bagaimana mereka melihat dan mengharapkan bank dapat membantu mereka. Maka dari itu dalam salah satu forum kita mempertemukan industri dengan pengusaha.

Sementara itu, forum dengan *fintech*, kita ingin menjajaki mereka ekspektasinya terhadap perbankan seperti apa. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan *fintech*. Namun, kita harus tahu juga *fintech* itu akan seperti apa ke depannya. Bagaimana mereka melihat perbankan, bagaimana bank bisa masuk dalam ekosistem mereka.

Poin penting dari *paper* yang disusun seperti apa?

Intinya perbankan harus berubah, terutama dari sisi *mindset* orang sebelum mengubah proses di industri itu sendiri. Sebagai contoh, untuk menarik minat *fintech* bekerja sama, perbankan harus ikut berubah. Kita ingin mengikuti pola yang sama, terutama dari sisi teknologinya. Jadi, digital bukan hanya dari yang terlihat (*front end*), tetapi dalam proses *back end* juga harus digital, *end-to-end*.

Oleh karena itu, melalui *paper* ini, kita akan minta ke pemerintah untuk membantu industri dalam menjawab tantangan zaman, di mana segala macam inovasi dan kebutuhan lebih cepat. Karena, arena permainan antara *fintech* dan perbankan

sangat berbeda, padahal produk yang ditawarkan ke masyarakat relatif sama.

Maka dari itu, kita minta regulator bisa menjadi penyeimbang antara inovasi dan risiko. Kita industri yang sangat dijaga risikonya. Oleh karena itu, ada birokrasi, sementara *fintech* tidak. Namun, jika *fintech* bermasalah, bank pasti akan terkena dampaknya sebagai satu industri keuangan. Kalau ada satu bagian dari industri bermasalah, pada umumnya akan merembet ke seluruh industri. Kepercayaan masyarakat bisa hilang.

Di luar digitalisasi, apa tantangan lain yang dihadapi perbankan?

Di luar revolusi digital, saya melihat ada satu isu yang sedang berkembang, yaitu likuiditas mengetat. Saat ini *loan to deposit ratio (LDR)* perbankan nasional sudah mencapai 92%. Bahkan, beberapa bank *LDR*-nya sudah di atas 100%. Ini bukan berarti tidak ada dana, melainkan dana yang ada di *market* saat ini menjadi lebih mahal. Jadi, mendapatkan nasabah baru menjadi tantangan tersendiri karena mahalnya dana tersebut.

Akibatnya, jika tingkat suku bunga naik, ada potensi *non performing loan (NPL)* naik. Padahal momentumnya saat ini *NPL* secara industri sudah turun. Jangan sampai ketika suku bunga naik, timbul masalah baru.

Adakah solusi jangka pendek untuk masalah likuiditas tersebut?

Kenaikan suku bunga tidak bisa dihindari. Ini berarti, perbankan harus merefleksikan kepada nasabah, dalam hal ini debitur. Untuk mengurangi besarnya kenaikan, kita harus mengembangkan transaksi demi meningkatkan *current account* dan *saving account (CASA)*. Bisa juga dengan menerbitkan pendanaan obligasi, atau menambah permodalan. Dengan kombinasi ini nasabah tidak perlu dikenakan kenaikan bunga sama dengan suku bunga BI.

Bagaimana dengan perbankan syariah?

Perbankan syariah saat ini terus tumbuh. Total volume sudah menembus angka 5% dibanding konvensional, dan per September total aset perbankan syariah 5,92%. Kita optimistis pada Desember 2018 volume perbankan syariah dibandingkan industri akan menembus angka 6%. Walaupun rata-rata perbankan syariah sudah *double digit* pertumbuhan persentase asetnya, tapi secara industri terhadap konvensional kenaikannya masih belum signifikan.

Contoh, CIMB Niaga Syariah aset per Desember 2017 ke September 2018 naik 32%, sedangkan *financing* naik 44,5%. Masalahnya, kita yang di unit usaha syariah (UUS) bisa tumbuh besar, tetapi industri kenaikannya tidak sebesar itu.

Tantangan lainnya?

Dari sisi yang lain, tingkat literasi masyarakat dan industri perbankan masih menjadi satu tantangan. Rendahnya tingkat literasi ini tidak hanya di masyarakat, tetapi juga di kalangan perbankan, termasuk perbankan konvensional.

Sementara itu, dari sisi produk, bank-bank besar sangat bervariasi, sementara produk di perbankan syariah sangat terbatas. Konsumen perbankan pada umumnya rasional, jika produknya sama atau lebih baik daripada perbankan



konvensional, *preference* konsumen ke bank syariah akan jauh lebih besar.

Jadi, penting bagi perbankan syariah untuk memiliki produk yang sama kompeten dan murah, untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu contohnya, *leasing*, yang mana tidak ada di perbankan konvensional. Seharusnya itu bisa menjadi nilai lebih dari perbankan syariah.

Selain produk, *service level* perbankan syariah juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai sudah punya produk dan *knowledge* yang bagus, murah, tetapi pelayanannya kurang. Nasabah tentunya juga ingin dilayani sama baiknya dengan bank konvensional. Bank syariah ini relatif masih baru, jadi harus mengejar ketinggalan dari bank konvensional. Mereka harus mempersiapkan kemampuan servisnya.

Modal juga menjadi masalah karena rata-rata bank syariah BUKU 2 tidak bisa dibandingkan dengan bank BUKU 3 dan 4. Jawabannya adalah bagaimana induk memiliki komitmen yang sama untuk mengembangkan perbankan konvensional dan syariah secara bersamaan.

Kerja sama yang dimaksud tidak harus dalam bentuk modal, tetapi dalam pengembangan produk secara bersama-sama. Induk tentunya memiliki tim produk dan promosi yang kuat, harusnya bisa membantu syariah. Kita bisa mengembangkan produk secara bersama-sama. Kerja sama ini juga bisa berlanjut ke pengembangan ke ranah digital. Jadi, saling melengkapi sebagai satu keluarga.

CIMB Niaga Syariah dalam sembilan bulan bisa tumbuh 32%, sementara nasional hanya 7,8%. Kenapa kita bisa maju? Karena, saya melihat ada komitmen dari induk.

Bagaimana dengan potensi bank syariah ke depan?

Momentum saat ini sangat bagus. Ada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), perbankan syariah cukup banyak di-*support* BI dan OJK. Regulator komitmennya sudah lebih nyata. Dari sisi nasabah sendiri, sudah banyak orang yang bertanya-tanya. Tidak sedikit nasabah-nasabah yang tanpa kita tawarkan sudah ingin produk syariah. Belum lagi dalam waktu dekat akan ada “Koridor Halal”.

Sementara dari sisi perbankannya sendiri sudah lebih siap. Terlebih setelah OJK mengesahkan kodifikasi dari tahun lalu, pembentukan produk dan sebagainya lebih mudah. Hanya saja untuk pertumbuhan yang lebih signifikan, industri perbankan syariah perlu diberikan insentif yang lebih. Pertumbuhan dari 5% ke 6% membutuhkan waktu dua tahun, karena itu untuk

menjadi 10% perlu *quantum leap*. Tentunya, insentif yang diberikan harus tepat guna.

Bagaimana dengan CIMB Niaga Syariah?

Dari sisi *financing*, pada Desember 2017 CIMB Niaga Syariah berada di angka Rp16,7 triliun. Tahun ini target kita bisa mencapai Rp24 triliun. Namun, per September 2018 sudah tembus Rp24,1 triliun. Untuk itu, kita ekspektasi per Desember 2018 mencapai Rp26 triliun. Dengan pertumbuhan sekitar Rp9,3 triliun, paling tidak, tahun depan minimal harus tumbuh Rp9,5 triliun.

Kebetulan *Board of Directors* CIMB Niaga memiliki komitmen untuk memajukan CIMB Niaga Syariah.

Contohnya, data pada Oktober 2018, *mortgage* yang kita bukukan pada bulan tersebut 45% syariah. Hanya berbeda sedikit dengan konvensional.

Strategi untuk mencapai target tersebut?

Strategi CIMB Niaga secara internal adalah syariah *first*, baik melalui KPI, *training* maupun dari sisi *marketing*-nya sendiri. Seluruh lini bisnis perusahaan direkomendasikan menawarkan syariah terlebih dahulu. Jika mereka tidak tahu, unit syariah akan turun tangan menjelaskan. Itu adalah resep yang kita lakukan selama ini.

Kedua, *leveraging* akan terus dikembangkan. Infrastruktur CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah menjadi satu, sehingga memudahkan nasabah. Ini kembali lagi menunjukkan komitmen dari bank induk. Kita punya program *dual banking leverage model*, di mana fungsi-fungsi yang ada di seluruh bank konvensional juga melekat terhadap unit syariah. Buat kita, ini juga *save cost*.

Anda termasuk pengurus Perbanas di bidang organisasi. Apa saja yang dilakukan bidang tersebut selama masa kepengurusan?

Pekerjaan terbesar buat saya di Perbanas tidak lain adalah IBEX 2018. Kebetulan CIMB Niaga yang ditunjuk menjadi panitia, dan CIMB Niaga menunjuk saya. Kalau dari sisi organisasi, seperti layaknya suatu kepengurusan organisasi lainnya, kita lebih banyak sifatnya internal.

Bagaimana peran asosiasi, dalam hal ini Perbanas, saat ini?

Saya lihat sudah baik dan sesuai ekspektasi. Yang penting, kita tetap secara kontinu dan konsisten, selalu menjadi *partner* pemerintah, khususnya di bidang perbankan. Kita juga bisa menjadi *check and balance* terhadap ekosistem yang ada. ■

"Obat Kuat" BI untuk Rupiah

Beberapa waktu belakangan ini, rupiah mengalami pelemahan. Salah satu upaya penguatan ditempuh BI dengan menerbitkan aturan *DNDF*.

Nilai tukar rupiah tengah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan nilai tukar rupiah diprediksikan akan berlanjut hingga akhir tahun 2018 dan diproyeksikan akan melampaui asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dipatok sebesar Rp13.400 per satu dolar AS (US\$).

Terkait dengan itu, berbagai langkah dan respons dilakukan Bank Indonesia (BI) sebagai pemangku kebijakan. Selain menaikkan suku bunga acuan, BI menelurkan aturan terkait dengan transaksi *domestic non-deliverable forward (DNDF)* sebagai bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ketentuan yang mengatur transaksi *DNDF* ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/10/PBI/2018. Dalam situs resmi BI dijelaskan bahwa peraturan ini sebagai salah satu upaya untuk peningkatan stabilitas nilai tukar rupiah, peningkatan pelaksanaan transaksi lindung nilai (*hedging*) bagi pelaku pasar, serta diperlukan pengembangan pasar valuta asing (valas) domestik melalui pengayaan instrumen lindung nilai. Pengayaan instrumen tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan alternatif lindung nilai di pasar valas domestik, yaitu dengan memperbolehkan bank untuk melakukan transaksi *DNDF*.

Adanya transaksi *DNDF* di pasar valas domestik diharapkan dapat memberikan keyakinan (*confidence*) pada pelaku pasar, baik eksportir, importir maupun investor asing yang memiliki aset rupiah, untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan pada pasar *spot*.

Untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, seluruh transaksi domestik *non-deliverable forward* ini wajib memiliki *underlying* transaksi. Di samping itu, bank yang melakukan transaksi ini harus menerapkan manajemen risiko, edukasi bagi nasabah, dan menerapkan perlindungan konsumen.

Adanya aturan ini memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan lindung nilai di pasar valas domestik, melengkapi instrumen lindung nilai yang sudah ada.



Kurs di salah satu bank; upaya memperdalam pasar keuangan

Sebelum aturan ini diterbitkan, transaksi *forward* dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh. Perbedaannya, transaksi *forward* di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib didukung dengan *underlying* transaksi, sedangkan pada transaksi *DNDF* semua nominal transaksi wajib didukung dengan *underlying* transaksi.

Di samping itu, transaksi *forward* diselesaikan dengan pergerakan dana secara penuh tetapi bisa dilakukan *rollover*, *early termination*, dan *unwind*. Sementara, untuk transaksi *DNDF*, penyelesaian transaksi dilakukan dengan menggunakan mekanisme *fixing* dan diselesaikan tanpa pergerakan dana secara penuh.

Dengan terbitnya ketentuan ini, pelaku pasar yang memiliki *underlying* transaksi tertentu dapat melakukan transaksi *DNDF*, yakni transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme *fixing* ialah penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

Kurs acuannya menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)* untuk mata uang dolar AS terhadap rupiah dan kurs tengah transaksi BI untuk mata uang nondolar AS terhadap rupiah. Penyelesaian transaksi *DNDF* tersebut wajib dilakukan dalam mata uang rupiah.

“Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan bagi eksportir, importir, serta investor dalam melakukan kegiatan ekonomi dan investasi melalui kemudahan transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman.

Sudah Sosialisasi dan Komunikasi

Sebelum diterbitkan dan diundangkannya PBI Nomor 20/10/PBI/2018 pada 27 September 2018, BI telah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku usaha di sektor perbankan dan investor asing. Langkah ini ditempuh agar semua pemangku kebijakan dan kepentingan bisa memanfaatkan alternatif instrumen yang ditawarkan dalam kebijakan transaksi *DNDF*.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pelaku perbankan dan para investor terkait dengan penerapan instrumen *DNDF* ini. Dirinya meyakini, kebijakan yang dikeluarkan BI ini akan mendukung stabilitas rupiah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah bank. Persiapan bank berlanjut. Di dalam operasionalnya, sejumlah bank sudah dikomunikasikan untuk persiapan operasinya. Tiap-tiap bank perlu ada kesiapan operasional, secara teknis, manajemen risiko, dan *treasury*-nya. Kami juga terus komunikasi dengan bank asing dan investor asing dalam memanfaatkan alternatif instrumen ini,” ujar Perry sebelum diberlakukannya aturan *DNDF*.

Penerapan *DNDF* merupakan respons dalam mengantisipasi ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi. Sebagai informasi, ekonomi AS diperkirakan masih tetap kuat, didukung akselerasi konsumsi dan investasi, dan dibarengi tekanan inflasi yang tetap tinggi. Dampak dari ketidakpastian tersebut membuat modal keluar deras dari negara-negara berkembang yang menimbulkan fluktuasi nilai tukar rupiah. Karena itu, kebijakan ini diharapkan akan menjadi alternatif instrumen yang memungkinkan bank dengan nasabah untuk melakukan transaksi lindung nilai atas risiko nilai tukar.

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Nanang Hendarsah, menjelaskan, *DNDF* merupakan instrumen *hedging non deliverable forward*. *DNDF* merupakan asuransi kontrak *hedging* sebesar tambahan Rp50,00 rupiah pada nilai kurs, yang meminimalisasi risiko kerugian nilai valas pengusaha bila terjadi pelemahan rupiah.

Instrumen tersebut bisa digunakan saat kondisi nilai tukar sedang tinggi dan memiliki dampak bagi pengusaha importir. Bila saat kontrak jual valas di Rp14.900,00, nantinya saat membeli valas pengusaha akan dikenakan Rp14.950,00 untuk transaksi pembelian valasnya.



MATERI PENGATURAN

- a. Seluruh transaksi *DNDF* wajib memiliki *underlying* transaksi.
- b. *Underlying* transaksi meliputi perdagangan barang dan jasa serta investasi di dalam dan di luar negeri, tetapi tidak termasuk
 1. surat berharga yang diterbitkan oleh BI;
 2. penempatan dana, antara lain tabungan, giro, deposito, dan *NCD*;
 3. fasilitas pemberian kredit yang belum ditarik;
 4. dokumen penjualan valas terhadap rupiah yang berasal dari penjualan *DHE*;
 5. kredit antarnasabah (*intercompany loan*);
 6. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan
 7. KUPVA.
- c. *Underlying* transaksi dibuktikan dengan dokumen *underlying* transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung.
- d. Transaksi *DNDF* dilakukan tanpa pergerakan dana secara penuh dengan mekanisme *fixing* dan menggunakan kurs *JISDOR* sebagai acuan.
- e. Mata uang penyelesaian transaksi adalah rupiah.
- f. Tenor/jangka waktu transaksi *DNDF* tidak dibatasi.
- g. Nominal dan jangka waktu transaksi *DNDF* dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *underlying* transaksi.
- h. Bank dilarang memberikan kredit dalam valas dan/atau dalam rupiah kepada nasabah dan/atau pihak asing untuk kepentingan transaksi *DNDF*.
- i. Bank yang melakukan transaksi ini harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan aturan OJK mengenai manajemen risiko bagi bank umum, memberikan edukasi kepada nasabah, dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.
- j. Bank dapat melakukan transaksi *DNDF* dengan bank di luar negeri dalam rangka untuk *cover hedging*.
- k. Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen *underlying* transaksi valas terhadap rupiah.

DNDF menggunakan nilai tukar berdasarkan *fixing rate JISDOR* dua hari sebelum jatuh tempo. Bila nanti ternyata rupiah melemah di Rp15.000,00 per satu dolar, bank akan membayar selisihnya menggunakan *settlement* rupiah. Dengan demikian, pemakaian valas pada perbankan pun berkurang.

“Untuk pelaksanaannya, pelaku usaha harus menggunakan *underlying*. Dengan demikian, instrumen ini tidak bisa dipakai sebagai spekulasi,” ujar Nanang. ■

Di Tengah Pengetatan Likuiditas dan Suku Bunga Tinggi

Ketidakpastian ekonomi masih terus berlangsung. Untuk terus tumbuh, pelaku industri perbankan harus mengantisipasi pengetatan likuiditas dan tren suku bunga tinggi.

Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan pada September 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 12,7% (*year on year/yo*). Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,9% (*yo*). Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan pertumbuhan kredit perbankan pada September 2018 ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja.

Penyaluran kredit yang terus mengalami pertumbuhan positif menunjukkan bahwa aktivitas perbankan dan intermediasinya cukup baik. Dengan perkembangan tersebut, BI meyakini pertumbuhan kredit pada 2018 masih akan berada pada kisaran proyeksi 10%-12% secara tahunan, meningkat dari pertumbuhan sepanjang 2017 yang sebesar 8,2%.

Survei Perbankan BI mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit baru akan meningkat pada triwulan IV 2018, yang tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) kredit baru yang meningkat menjadi 94,8%. Hal ini didorong oleh tingginya optimisme responden seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih kuat, risiko penyaluran kredit yang rendah, dan rasio kecukupan modal yang meningkat.

Indikasi meningkatnya pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2018 juga disertai standar penyaluran kredit yang akan lebih ketat. Hal ini tercermin dari Indeks Lending Standard sebesar 17,7%, lebih tinggi daripada periode sebelumnya 3,8%. Pengetatan penyaluran kredit terutama akan dilakukan terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja, yaitu pada aspek plafon kredit, premi kredit yang berisiko, dan jangka waktu pemberian kredit. Di lain sisi, kebijakan penyaluran kredit konsumsi terindikasi masih relatif longgar, terutama pada kredit kepemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) seiring dengan kebijakan BI terkait dengan relaksasi *loan to value (LTV)* kredit/pembiayaan perumahan.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyatakan kinerja sektor perbankan masih baik, meskipun di tengah ketidakpastian global. OJK memperkirakan pertumbuhan kredit hingga akhir 2018 bisa menembus kisaran 13% dan pada 2019 di kisaran 12%.

“Akhir tahun kita harapkan bisa mencapai lebih dari itu. Bisa 13% mungkin. Tahun depan bisa sekitar 12%. Ya, tentunya dengan kondisi ekonomi yang kita belum tahu



Teller bank; 2019 lebih sulit

seberapa besar nanti *magnitude* dampak perang dagang, menurut hemat kami 12% mungkin bisa,” terang Wimboh.

Menurutnya, stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kecukupan modal per September 2018 yang sebesar 23,3%. Meskipun likuiditas perbankan sedikit menurun di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih terus terjadi hingga saat ini, likuiditas tersebut masih memadai.

Tahun depan kondisi yang dihadapi perbankan lebih sulit. Merujuk pada pemaparan BI terkait dengan situasi pasar keuangan global pada 2019, setidaknya ada beberapa tantangan yang bakal dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia. Tantangan itu di antaranya kenaikan suku bunga The Fed dan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ ECB).

Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed, diperkirakan bakal mengerek suku bunga acuan hingga level 3,25%. Proyeksi ini sudah memperhitungkan dua kali kenaikan suku bunga hingga akhir tahun. Lalu, adanya kepastian ECB yang mulai mengurangi likuiditasnya dengan menaikkan suku bunga acuan, yang diperkirakan bakal dilakukan pada semester kedua 2019. Situasi ini juga dianggap memberikan tekanan.

Kendati demikian, BI menganggap, faktor kenaikan suku bunga acuan AS masih dominan memengaruhi negara

berkembang, seperti Indonesia, ketimbang kebijakan yang dilakukan ECB.

“Kenaikan suku bunga AS pengaruh ke *emerging market*, dibandingkan *policy* dari ECB dan intervensi Bank of Japan,” jelas Deputy Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara.

Tekanan Suku Bunga The Fed

BI memproyeksikan The Fed akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Mirza mengatakan, suku bunga acuan AS (*Fed Fund Rate*) hingga 2019 diperkirakan akan menyentuh 3,25%. “Dalam proyeksi kami suku bunga AS pada 2019 akan naik menjadi 3,25%. Kenaikan ini direspons negara tetangga dan kami di BI,” terang Mirza.

Mirza mengungkapkan BI akan terus menjalankan pola kebijakan *hawkish* dengan mementingkan pasar dan tetap independen. “AS pasti naikan bunga. Negara tetangga juga. Kami akan *ahead the curve*. *Policy* kami tetap *hawkish*,” ungkap Mirza.

Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menilai, tekanan rupiah terhadap dolar AS diperkirakan mulai mereda pada tahun depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan berada pada kisaran Rp14.800-Rp15.200, yang



Wimboh Santoso; kinerja masih baik

ditopang oleh prospek perbaikan tingkat *current account deficit*. “Tahun depan tekanan terhadap rupiah tidak akan sebesar tahun ini, akibat menurunnya ketidakpastian serta prospek membaiknya defisit transaksi berjalan,” ujar Perry.

Ia menyebutkan, saat ini rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.300 atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Perry memperkirakan, pada 2019 rupiah akan berada di kisaran Rp14.800-Rp15.200 per dolar AS.

Menurutnya, BI terus berupaya menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi ganda dengan pembelian valuta asing (valas) atau Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. “Penyediaan

swap valas yang murah dan penyediaan instrumen lindung nilai (*hedging*) transaksi *DNDF*,” ungkap Perry.

Selain itu, BI akan mengakselerasi pasar uang rupiah dan mendorong berkembangnya *interest rate swap*. “BI juga sudah melakukan perlonggaran *LTV* serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi,” terang Perry. ■

Likuiditas Mengetat

BI menilai stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga disertai dengan intermediasi perbankan yang meningkat, meski rasio likuiditas perbankan pada Agustus 2018 menurun menjadi 18,3% dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19,8%. Deputy Gubernur BI, Erwin Rijanto, mengatakan, menurunnya rasio likuiditas perbankan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK). “Ada gap antara DPK dan kredit. Sebenarnya empat tahun terakhir pertumbuhan DPK sangat rendah karena banyak sekali yang menaruh dananya di Surat Berharga Negara (SBN),” ujar Erwin.

Di lain sisi, pembiayaan ekonomi melalui pasar modal, yakni penerbitan saham, obligasi korporasi, *medium term notes*, dan *negotiable certificate of deposit* selama Januari-Agustus mengalami penurunan. Pada periode 2018 sebesar Rp146,1 triliun (*gross*), turun dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebesar Rp183,7 triliun.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pengetatan likuiditas dengan ditandai peningkatan *loan to deposit ratio* (*LDR*) masih akan berlanjut hingga 2019. Hal ini seiring dengan ketidakpastian global, seperti perang dagang dan kenaikan suku bunga The Fed.

LDR menjadi parameter untuk melihat ketersediaan dana (likuiditas) bank untuk memenuhi penyaluran kreditnya. Berdasarkan Peraturan Nomor 17/11/PBI/2015 batas bawah *LDR* yang kemudian berubah menjadi *loan to funding ratio* (*LFR*) sebesar 78%, sedangkan batas atasnya ditetapkan sebesar 92%.

Anggota Dewan Komisiner LPS, Destry Damayanti, menjelaskan, hingga tahun depan, posisi *LDR* bank umum masih berada di kisaran 93% hingga 94%. “Kalau kami mencoba simulasikan, maka angka *LDR* masih 93% hingga 94% dan angka tidak terlalu berubah banyak karena kita tidak melihat pelompatan lebih tinggi dari kredit. Kalau data dari kita proyeksikan pada 2019 pertumbuhan kredit masih 11,5% dan DPK 9% dan kurang lebih DPK ada ruang perbaikan” kata Destry.

Destry menambahkan, untuk September 2018, posisi *LDR* bank umum secara industri mengalami peningkatan menjadi 94,3% dibandingkan dengan *LDR* pada periode yang sama tahun lalu sebesar 89,1%. LPS menilai, kondisi *LDR* perbankan yang terus mengalami peningkatan telah mendorong risiko pengetatan likuiditas ikut meningkat di tengah tren kenaikan suku bunga simpanan dan membaiknya penyaluran kredit.

Butuh Penguatan Modal

Industri perbankan nasional membutuhkan penguatan permodalan untuk menghadapi era suku bunga tinggi dan menjaga keberlangsungan bisnis. Salah satunya melalui investasi asing.

Deputi Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Slamet Edy Poernomo, dalam sebuah seminar menyatakan bahwa industri perbankan nasional terus berkembang sehingga membutuhkan penguatan permodalan agar makin kompetitif. Ia menjelaskan, sudah setahun terakhir OJK melakukan *assessment* untuk menilai kondisi masing-masing bank. Dari hasil penilaian tersebut, nantinya diputuskan apakah perlu dimerger atau tidak. “Keputusan merger atau akuisisi tetap kami serahkan kepada manajemen,” terang Slamet.

Belajar dari krisis 1998, menurut Poltak Hotradero, *Senior Economist* Bursa Efek Indonesia (BEI), penguatan permodalan menjadi suatu keniscayaan. Apakah bentuknya merger, akuisisi, atau penambahan modal melalui pasar modal, itu pilihan. “Saluran pasar modal saat ini mengalami tren pertumbuhan yang luar biasa. Saham-saham perbankan masuk dalam jajaran saham pilihan,” ujar Poltak.

Demikian pula dengan sumber permodalan. Modal dalam negeri ataupun modal asing tak jadi masalah. Keduanya sangat diperlukan.

Hal senada ditegaskan Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank (biri). Menurutnya, investasi asing adalah satu keniscayaan di tengah besarnya kebutuhan permodalan industri perbankan nasional. “Yang penting, bagaimana mereka mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional,” tegas Eko.

Di luar itu, di tengah mengetatnya likuiditas, perbankan nasional dinilai masih akan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, penerapan standar Basel III yang akan diterapkan pada 2019 mendatang, di mana beberapa indikatornya harus dipenuhi perbankan di Indonesia terkait dengan implementasi aturan internasional. “Ada tantangan pada penerapan Basel III, perbankan harus memperbaiki pendanaan mereka,” kata Poltak.

Poltak menambahkan, perbankan harus lebih selektif terhadap pendanaan mereka agar tidak mengganggu permodalan. Ia menyebut, saat ini tren pendanaan lebih banyak ke tenor jangka pendek. “Oleh karena itu, perbankan

harus memperbaiki manajemen untuk salurkan pendanaan ke tenor jangka panjang,” tambah Poltak.

Selain itu, industri perbankan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar bebas Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bank-bank nasional pun harus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, terutama dari sisi struktur pendanaan, agar mampu bersaing dengan negara tetangga. Tantangan lainnya adalah kompetisi pada iklim hasil bunga bersih (*net interest margin/NIM*) yang makin menurun dari waktu ke waktu.

“Penurunan *NIM* masih menjadi tantangan. Saat ini *NIM* Indonesia masih tertinggi di dunia. *NIM* di Indonesia 5,5%, sementara Filipina 3% dan Singapura 1,8%. Jadi, kalau ini pasar terbuka 2020, maka derajat penyusutan *NIM* semakin besar di Indonesia,” jelas Poltak.



Adrian Panggabean; kredit melambat

Melambat

Adrian Panggabean, Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk, memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 hanya akan mencapai 4,9%. Artinya, lebih rendah dari asumsi pemerintah yang sebesar

5,3%. Depresiasi rupiah dan terus melemahnya konsumsi domestik menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Nilai tukar rupiah tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (US\$) yang dipicu oleh pengetatan kebijakan suku bunga acuan The Fed. Adrian juga menyebutkan, konsumsi domestik hanya akan tumbuh 4,93% pada 2019. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.

Selain itu, Adrian memprediksikan, arus investasi pada tahun depan hanya tumbuh sekitar 4%. Hal itu disebabkan adanya pengetatan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang akhirnya harus diserap industri perbankan dengan kenaikan suku bunga simpanan.

Pengetatan kebijakan moneter dengan kenaikan suku bunga akan membuat pertumbuhan kredit perbankan melambat. Adrian memproyeksikan, pertumbuhan kredit industri perbankan hanya berada di angka 8,2% pada 2019. ■

Perbanas Sulut Peduli Korban Gempa Sulteng

Bencana yang menimpa Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 28 September 2018 mendorong insan perbankan Sulawesi Utara (Sulut) untuk menunjukkan kepeduliannya. Perbanas Sulut bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sulut menggalang bantuan untuk warga yang menjadi korban.

Seperti bantuan yang diberikan untuk korban bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sumber dana bantuan adalah kas yang disisihkan organisasi untuk korban bencana. Bantuan yang diberikan terdiri atas kebutuhan sehari-hari seperti makanan, handuk, sabun mandi, susu dan peralatan bayi. Kedua organisasi ini berharap, semua bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga yang menderita akibat bencana tersebut.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Oktober 2018, dampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda empat daerah di Sulteng: Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong, menyebabkan 2.256 orang meninggal dunia. Menurut hasil perhitungan sementara Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari Rp13,82 triliun. Dari angka itu, kerugian mencapai Rp1,99 triliun dan kerusakan mencapai Rp11,83 triliun.

Dampak kerugian dan kerusakan dirasakan lima sektor pembangunan. Perinciannya, kerusakan di sektor pemukiman mencapai Rp7,95 triliun, sektor infrastruktur tercatat Rp701,8 miliar, sektor ekonomi produktif sebesar Rp1,66 triliun, sektor sosial Rp3,13 triliun, dan lintas sektor mencapai Rp378 miliar. BNPB akan terus melakukan pencatatan, dan diperkirakan angka itu akan terus meningkat. ■



Panen Lele Perdana Perbanas Jabar

Awal Oktober 2018 menjadi momen istimewa bagi pengurus Perbanas Jawa Barat (Jabar). Program Desa Asuh yang digagas Perbanas Jabar pada 4 Agustus 2018 melalui pelatihan budi daya lele sudah memberikan hasil. Tepatnya, pada 5 Oktober 2018 kolam lele di Kampung Kahuripan, Desa Nagrog, Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang menjadi lahan pelatihan sudah dapat dipanen hasilnya.

Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, mengatakan, panen lele ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan Perbanas Jabar dan masyarakat Kampung Kahuripan bukan sekadar seremonial. Program Desa Asuh merupakan inisiatif Perbanas Jabar bekerja sama dengan Universitas Widyatama Bandung. Program ini diresmikan pada 4 Agustus di Kampung Kahuripan, Desa Nagrog, Cicalengka, Kabupaten Bandung. Upaya Perbanas Jabar ini menurut Iwa sejalan dengan program Pemerintah Daerah Provinsi Jabar yang mencanangkan satu desa-satu produk dan satu pesantren-satu produk.

Sementara itu, Rudy Kurniawan, Ketua Perbanas Jabar, mengatakan bahwa program ini menjadi bukti kepedulian Perbanas Jabar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Harapannya, program ini dapat terus berlanjut dan menyebar ke desa lainnya.

Demi keberhasilan Program Desa Asuh, Perbanas Jabar siap menerima berbagai ide untuk diterapkan di program ini. Rudy meyakinkan bahwa melalui program ini Perbanas Jabar akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ■



Setetes Darah, Sejuta Harapan

Pada 10 Oktober 2018 Perbanas Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah di Kantor Cabang Utama BCA Jalan Diponegoro, Medan. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan Perbanas Sumut. Kegiatan donor darah dengan tema “Setetes Darah, Sejuta Harapan” ini merupakan wujud kepedulian Perbanas Sumut kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan sosial ini melibatkan lebih dari 200 pendonor yang sebagian adalah para profesional bank anggota Perbanas Sumut. ■



Inklusi Keuangan di Sekolah Kalam Kudus Medan

Pada 15 Oktober 2018 pengurus dan perwakilan anggota Perbanas Sumatera Utara (Sumut) berkunjung ke Sekolah Kalam Kudus Medan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka kegiatan inklusi keuangan. Segenap pengurus dan anggota Perbanas mengajak siswa Sekolah Kalam Kudus Medan untuk rajin menabung dan mengajarkan pentingnya menabung sejak dini. Hadir dalam kegiatan ini Thomas Cipta Kusuma, Ketua Perbanas Sumut; Harun Ongah, Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM Perbanas Sumut; Denny Muljono, Ketua Bidang Humas dan Keanggotaan Perbanas Sumut; dan Neven Sutanto, pengurus Yayasan Kalam Kudus. ■



Hadapi Revolusi Industri dengan Persiapan Matang

Revolusi industri 4.0 menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan. Melalui IBEX 2018, diharapkan para pelaku industri perbankan dan pemangku kepentingan memiliki kesepahaman dalam menghadapi era tersebut.

Laju perubahan yang makin cepat menuju revolusi industri 4.0 telah mengubah cara hidup masyarakat dalam bekerja dan berhubungan satu sama lain. Tak terkecuali, sektor perbankan yang menghadapi lebih banyak tantangan. Terlebih dengan hadirnya *financial technology (fintech)* dan mitra teknologi lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Digitalisasi ekonomi memang membawa manfaat bagi konsumen serta membuka peluang pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pintar, terdigitalisasi, serta terhubung memungkinkan aktivitas ekonomi modern dilakukan dengan lebih fleksibel, tangkas, dan cerdas. Namun, ekonomi digital tetap menjadi tantangan karena kompleksitasnya.

Ketua Umum Perbanas yang juga Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa transformasi digital merupakan transformasi industri keempat. Hal itu pasti akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. “Revolusi industri 4.0 ini bukan suatu yang agak jauh, melainkan sudah dekat. Misalnya, *blockchain*, sudah ada proses transfer antarnegara yang menggunakan sistem tersebut,” tandas Kartika.

Menurut Kartika, bank-bank anggota Perbanas sebetulnya telah memahami hal tersebut dan bekerja keras untuk menjawab perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, saat perbankan dituntut harus mampu berinovasi dengan lincah, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi serta pengelolaan risiko-risiko terkait tetap tidak boleh ditinggalkan.

Lebih jauh, Kartika berharap, industri perbankan mampu memahami bagaimana teknologi maju tersebut dimanfaatkan untuk memaksimalkan peluang inovasi, model, dan proses baru dalam berbisnis, serta produk dan layanan yang lebih baik. Terlebih lagi, Indonesia masih memiliki isu terkait dengan kepercayaan, privasi, dan transparansi yang harus ditangani seiring dengan makin intensifnya transformasi teknologi finansial di Indonesia.

Karena itu, Perbanas kembali menghadirkan gelaran tahunan Indonesia Banking Expo (IBEX) pada 15 November 2018 dengan tema “*The Next Generation of Banking in the Fourth Industrial Transformation*”. Ajang tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai sektor yang terkait dengan perbankan, mulai dari sektor manufaktur, transportasi, hingga teknologi finansial serta mitra teknologi yang sedang marak saat ini.



“Tujuannya adalah setiap tahun kami ingin memberikan edukasi dan *showcase* kepada masyarakat luas dan *stakeholders*, bagaimana industri perbankan ini berkembang dan bagaimana menjawab tantangan zaman untuk kebutuhan para nasabah di masa yang akan datang,” imbuh Kartika.

Melalui IBEX 2018, Kartika menambahkan, diharapkan ada kesepahaman dari seluruh *stakeholders* mengenai peran masing-masing sektor serta pemanfaatan teknologi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada IBEX kali ini mereka akan terlibat dalam diskusi panel dan diskusi kelompok untuk membahas peran teknologi dalam transformasi industri generasi keempat serta bagaimana sektor perbankan menyikapinya.

Ketua *Steering Committee* IBEX 2018, Tigor M. Siahaan, menjelaskan, sektor perbankan memahami bahwa jawaban terhadap perubahan akibat revolusi teknologi ini harus holistik dan strategis. Karena itu, sangat penting untuk ikut melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta hingga akademisi dan masyarakat secara luas. “Perbankan tengah mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk berevolusi dalam lingkungan yang makin kompetitif,” kata Direktur Utama Bank CIMB Niaga ini.

Berbeda dengan pergelaran sebelumnya, IBEX kali ini akan digelar dalam satu hari saja. Tujuannya, agar diskusi yang dilakukan lebih terfokus sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak untuk diteruskan kepada pemerintah. ■

Bersiap Menerapkan PSAK 71

PSAK 71 akan segera diterapkan. Bank harus mempersiapkan diri karena perubahan yang dibawa PSAK 71 cukup substansial. Perbanas pun bersiap dengan menggelar sosialisasi kepada para anggotanya.

Bila tak ada aral melintang, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 tentang Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan dengan Konsep *Expected Loss* akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. PSAK 71 yang mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 akan menggantikan PSAK 55 (adopsi dari International Accounting Standards/IAS 39) dan PSAK 50 (IAS 32) yang pembentukan cadangan kerugiannya menggunakan metode *incurred loss*.

Sebelum standar keuangan tersebut diberlakukan, menurut Arief Tjahjono, Anggota Bidang Hukum Perbanas, bank harus mempersiapkan diri karena perubahan yang dibawa PSAK 71 cukup substansial. “Apakah perubahan-perubahan ini akan berdampak terhadap penghitungan pajak dan yang lainnya, kita harus persiapkan terlebih dahulu,” ungkapnya ketika membuka acara Sosialisasi PSAK 71 pada 7 Desember 2018 di Griya Perbanas.

Sudono Salim, *Senior Manager* Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCooper (PwC) Indonesia, sebelumnya menerangkan bahwa perubahan di PSAK 71 dibandingkan dengan PSAK 50 dan 55 mencakup beberapa hal. Satu, metode *incurred loss* bersifat *backward looking* karena cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan/kredit dibentuk ketika kualitasnya telah menurun (*impaired*). Sementara, metode *expected loss* bersifat *forward looking*. Metode ini lebih merefleksikan perubahan ekspektasi risiko kredit sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap risiko kredit.

Dua, pembentukan cadangan dengan menggunakan metode *incurred loss* mengacu pada keberadaan bukti objektif telah terjadi penurunan nilai aset keuangan. Sementara, metode *expected loss* memperhitungkan kemungkinan (probabilitas) terjadinya penurunan nilai pada masa mendatang. “Maka dari itu, perhitungan *impairment*-nya benar-benar mengandalkan seluruh informasi, seperti data histori, saat ini, dan ekspektasi masa depan,” tegasnya.

Tiga, pada metode *incurred loss*, ekspektasi kerugian dari aset keuangan dihitung berdasarkan saldo (*outstanding*) atau nilai terkini aset keuangan pada saat cadangannya akan dibentuk. Sebaliknya, pada metode *expected loss*, ekspektasi kerugian diperhitungkan pada saat pemberian kredit di awal atau ketika aset keuangan diperoleh (*early recognition*), tanpa harus didahului oleh adanya *credit loss event*.



Samuel Ong, *Technical Advisor* PwC Indonesia, membeberkan bahwa pemberlakuan PSAK 71 tentu akan menciptakan beberapa tantangan, di antaranya adalah adanya konsekuensi pembentukan cadangan akan meningkat. “Imbarnya, laba akan tertekan dan pada akhirnya memengaruhi permodalan bank,” ujarnya.

Hanya saja, Samuel mengakui, pemberlakuan PSAK tersebut akan memunculkan kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, metode PSAK ini melibatkan *modelling* dan data yang kompleks serta penggunaan asumsi dan *judgement* dalam menentukan risiko kredit yang akan dihadapi pada masa mendatang. Meski begitu, masih ada waktu bagi bank untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. ■

Perbanas Sulsel Gelar Fun Walk, Fun Run, dan Fun Bike Gratis

Perbanas Sulsel punya cara tersendiri untuk dekat dengan masyarakat di lingkungannya. Salah satunya dengan menggelar *Fun Walk*, *Fun Run*, dan *Fun Bike* gratis bagi seluruh *stakeholders* di Makassar.

Sebagai organisasi perbankan terkemuka, Perbanas tentunya memiliki banyak program di luar kegiatan perbankan. Dalam bidang sosial dan olahraga, baru-baru ini Perbanas Sulawesi Selatan (Sulsel) menyelenggarakan kegiatan *Fun Walk*, *Fun Run*, dan *Fun Bike* gratis di Lapangan Karebosi Makassar.

Cuaca mendung yang sesekali diselingi gerimis tidak menyurutkan semangat ribuan peserta *Fun Run*, *Fun Bike*, dan *Fun Walk* Perbanas di kawasan Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Makassar, Minggu (16/12/2018). Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Bambang Kusmiarso bersama Penasihat Perbanas Sulsel, Hudli Huduri; Plt Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, Ellong Tjandra; Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6, Sulampua Dani Surya; dan beberapa pimpinan bank di Sulsel melepas peserta *Fun Walk*, *Fun Run*, dan *Fun Bike*.

Penasihat Perbanas Sulsel, Hudli Huduri, mengemukakan kegiatan ini merupakan salah satu program Perbanas Sulsel di bidang sosial dan olahraga yang mengedepankan kebersamaan, yakni sepeda sehat dan jalan sehat. Meskipun acara ini merupakan inisiasi dari Perbanas, kegiatan ini turut melibatkan industri jasa keuangan (IJK) nonbank, komunitas sepeda, serta pejalan kaki. Tujuannya untuk mempererat kebersamaan Perbanas dengan industri keuangan lainnya serta lebih dikenal masyarakat Makassar dan Sulsel pada umumnya.

“Ini tidak dipungut biaya dan dibuka untuk umum. Hadiah yang disiapkan menarik, mulai dua unit (sepeda) motor, 20 sepeda lipat, empat sepeda gunung, dan 10 tabungan emas ini sumbangsih dari industri jasa keuangan di Sulsel,” kata Hudli sebagai ketua panitia.

Masyarakat Sulsel begitu antusias dengan kegiatan tersebut. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 8.000, yang diikuti oleh karyawan, keluarga, mitra, dan masyarakat umum. Angka ini jauh melampaui target yang dicanangkan, yaitu 5.000 peserta. Yang menarik, meskipun cuaca kurang mendukung, acara dapat terselenggara dengan lancar sampai akhir. “Meski sempat hujan, peserta tetap semangat ikut kegiatan kami hingga selesai,” timpal Hudli.

Sementara itu, Ketua Perbanas Sulsel, Harry Edward Kwenre, mengatakan selama setahun terakhir Perbanas telah melaksanakan berbagai program di luar kegiatan rutin. Kegiatan yang dimaksud di antaranya program penghijauan, baik itu sebagai sponsor maupun turut menyumbangkan bibit.

“Itu program kami di 2018 dan sampai sekarang tetap jalan. Program rutin adalah donor darah, baik di instansi masing-masing maupun kerja sama,” tambah Harry. ■





PERBANAS
PERHIMPUNAN BANK NASIONAL

Segenap Pengurus dan Anggota
PERBANAS

Mengucapkan

SELAMAT NATAL 2018
&
TAHUN BARU 2019

